

SIARAN PERS

KINERJA INDUSTRI JASA KEUANGAN DI WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA POSISI AGUSTUS 2025 TERJAGA STABIL DAN TUMBUH POSITIF

Denpasar, 13 Oktober 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menyatakan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara posisi Agustus 2025 tetap resilien dan terjaga stabil tercermin dari fungsi intermediasi berjalan baik, serta likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai.

Kinerja intermediasi perbankan (Bank Umum dan BPR) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara posisi Agustus 2025 menunjukkan daya tahan yang solid. Penyaluran kredit maupun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan dari periode sebelumnya. Penyaluran kredit mencapai Rp241,52 triliun atau tumbuh 6,89 persen *yoy*, sedikit melandai dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 8,30 persen *yoy* (Juli 2025: 7,61 persen *yoy*).

Berdasarkan jenis penggunaannya, sebesar 57,84 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada kredit produktif, yaitu 32,65 persen dalam bentuk modal kerja dan 25,19 persen dalam bentuk investasi.

Pertumbuhan kredit *yoy* didorong oleh peningkatan nominal kredit investasi yang bertambah sebesar Rp13,01 triliun atau tumbuh 27,22 persen *yoy* lebih tinggi dibandingkan Agustus 2024 yang tumbuh sebesar 21,44 persen *yoy* (Juli 2025: 32,37 persen *yoy*). Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek kondisi ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara didominasi oleh Sektor Bukan Lapangan Usaha dengan *market share* sebesar 42,16 persen dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 23,53 persen.

Peningkatan nominal kredit di Provinsi Bali utamanya disumbangkan oleh Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha yang bertambah sebesar Rp1,92 triliun (tumbuh 5,13 persen *yoy*). Sementara itu, di Provinsi NTB, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari Sektor Pertambangan dan Penggalan yang bertambah sebesar Rp4,63 triliun (tumbuh 37,37 persen *yoy*). Sedangkan di Provinsi NTT, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari oleh Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha yang bertambah sebesar Rp1,73 triliun (tumbuh 6,53 persen *yoy*).

Berdasarkan kategori debitur, sebesar 41,61 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pertumbuhan sebesar 1,10 persen *yoy*, sedikit melandai dibandingkan Juli 2025 yang tumbuh sebesar 1,18 persen *yoy*. Tingginya porsi penyaluran kredit perbankan kepada UMKM menunjukkan keberpihakan bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit, penghimpunan DPK juga mengalami pertumbuhan positif. Penghimpunan DPK posisi Agustus 2025 mencapai Rp297,25 triliun atau tumbuh 7,88 persen *yoy*, melandai dibandingkan posisi Agustus 2024 yang sebesar 13,84 persen *yoy* (Juli 2025: 8,62 persen *yoy*). Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan Agustus 2024 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp11,58 triliun dan deposito sebesar Rp8,97 triliun.

Fungsi intermediasi yang tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) posisi Agustus 2025 sebesar 81,25 persen, sedikit melandai dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 82,01 persen (Juli 2025: 81,66 persen).

Kredit bermasalah perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tetap terjaga di bawah *threshold* (5 persen) dengan *Non Performing Loan* (NPL) *gross* sebesar 3,12 persen melandai dibandingkan posisi Juli 2025 yang sebesar 3,15 persen (Agustus 2024: 2,95 persen).

Ketahanan likuiditas dan permodalan perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga tetap kuat tercermin dari *Cash Ratio* (CR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio CR BPR di Bali sebesar 14,83 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 20,41 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,49 persen. Sementara itu, CAR BPR di Bali sebesar 31,68 persen, NTB sebesar 46,38 persen, dan NTT sebesar 43,03 persen. Tingginya permodalan perbankan diyakini mampu menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi ketidakpastian global. OJK akan terus mendorong kinerja intermediasi perbankan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan terjaganya likuiditas.

Perkembangan Sektor Pasar Modal

Jumlah investor Pasar Modal di wilayah Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu mencapai *double digit* secara *yoy*. Pada Agustus 2025, jumlah investor saham di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 282.367 *Single Investor Identification* (SID) atau tumbuh 29,81 persen *yoy*. Demikian juga dengan jumlah investor Reksa Dana dan SBN yang keduanya tumbuh berturut-turut sebesar 23,82 persen *yoy* dan 17,68 persen *yoy*.

Nilai kepemilikan saham di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp9,16 triliun atau tumbuh 2,52 persen *yoy*. Sementara itu, nilai transaksi saham mencapai Rp5,02 triliun atau tumbuh 55,80 persen *yoy*.

Perkembangan Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura

Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara posisi Juli 2025 masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, walaupun dengan laju yang melandai dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp19,30 triliun, atau tumbuh 7,23 persen *yoy*, meningkat dibandingkan posisi Juni 2025 yang tumbuh sebesar 4,70 persen *yoy* (Juli 2024: 10,83 persen *yoy*).

Sementara itu, penyaluran pembiayaan melalui Modal Ventura posisi Juli 2025 sebesar Rp330,01 atau tumbuh 2,98 persen *yoy*, membaik jika dibandingkan Juni 2025 yang tumbuh sebesar 1,37 persen *yoy* (Juli 2024: 10,73 persen *yoy*).

Di sisi lain, tingkat pembiayaan bermasalah Perusahaan Pembiayaan relatif rendah dengan *Non Performing Financing* (NPF) posisi Juli 2025 sebesar 1,73 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,40 persen. Sementara itu, NPF dari pembiayaan Modal Ventura posisi Juli 2025 sebesar 7,35 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,20 persen.

Edukasi dan Pelindungan Konsumen

OJK senantiasa berkomitmen mendorong terwujudnya literasi dan inklusi keuangan bagi semua pihak, termasuk bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu sasaran prioritas edukasi keuangan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025.

Dalam rangka memperkecil *gap* tingkat literasi dan inklusi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, OJK terus melakukan bauran strategi yang dilaksanakan antara lain melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara *online*, aliansi strategis, dan juga melalui edukasi keuangan secara tematik.

Selama tahun 2025 hingga bulan September, OJK di wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan 333 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota yang tersebar di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang telah menjangkau lebih dari 36.900 orang dan juga edukasi melalui media sosial yang menjangkau lebih dari 311.500 orang.

Selain itu juga terdapat pelaksanaan kegiatan edukasi oleh Lembaga Jasa Keuangan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang sampai dengan September 2025 telah mencapai 4.487 kegiatan dan menjangkau lebih dari 782.400 peserta kegiatan.

Kegiatan edukasi keuangan dilakukan oleh OJK maupun bekerjasama dengan *stakeholders* melalui program intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-5 km *care*, edukasi *segmented* kepada pelajar, mahasiswa, akademisi, ibu rumah tangga, komunitas disabilitas, pelaku UMKM, *Training of Trainers (ToT)* bagi duta literasi keuangan, aliansi strategis dengan anggota Satgas Pasti, edukasi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta edukasi di wilayah pedesaan bersama universitas melalui program Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN LIK) tahun 2025.

Selain itu, dilakukan juga kegiatan edukasi secara *online* seperti edukasi melalui media sosial yaitu Instagram dan publikasi Iklan Layanan Masyarakat pada radio serta media *online* yang ada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.

Berbagai upaya literasi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK disertai dengan penguatan program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, di antaranya melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang

melibatkan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan *stakeholders* lainnya.

Selama tahun 2025 hingga bulan September, TPAKD di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah menyelenggarakan 708 kegiatan dengan total peserta lebih dari 57.979 orang. berbagai program kerja TPAKD, yang meliputi kegiatan asistensi dan pendampingan UMKM, optimalisasi pembiayaan di sektor pertanian melalui Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP), optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), hingga program inklusi untuk pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar).

OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK); www.kontak157.ojk.go.id, baik yang berindikasi sengketa maupun yang berindikasi pelanggaran. Terkait hal tersebut, selama tahun 2025 hingga bulan September, OJK di wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah menerima 1.492 pengaduan, yaitu sebanyak 669 merupakan pengaduan sektor perbankan, 813 merupakan pengaduan sektor Industri Keuangan Non Bank, serta 10 pengaduan sektor Pasar Modal.

Status pengaduan yang masuk selama tahun 2025 hingga bulan September yaitu sebanyak 1.322 pengaduan telah diselesaikan, 170 pengaduan dalam proses penyelesaian oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Dalam rangka mendukung kelancaran kredit/pembiayaan dari Industri Jasa Keuangan kepada Masyarakat, OJK memberikan pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Selama tahun 2025 hingga bulan September, OJK di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan pelayanan penarikan data iDeb SLIK baik secara *online* maupun *walk in* sebanyak 20.977 orang.

Dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil, OJK optimis sistem keuangan dapat terjaga stabil dan tumbuh secara berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut:

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu
Telp. (0361) 2094070; Email: ojkbali@ojk.go.id